

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Etika Pemerintahan
KODE MK	:	3PBIP300
SEMESTER	:	3

Tim Penyusun:

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

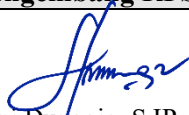
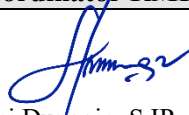
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1					Kode Dokumen RPS-3PBIP300
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Etika Pemerintahan		3PBIP300	MKWP	T=3	P=0	3	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK			Ketua PRODI	
		 Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. NIDN. 0930048307	 Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. NIDN. 0930048307...			 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.					
	CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-10	Mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik serta usaha dan layanan berbasis teknologi (technopreneurship) secara beretika, kreatif, kolaboratif, dan adaptif, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan daya saing bangsa. — Penciri UNISAN.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika, filsafat moral, dan teori-teori etika pemerintahan (utilitarisme, deontologi, keutamaan) sebagai landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan antikorupsi.					
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis penerapan prinsip etika pemerintahan—akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan antikorupsi—dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk hubungan pusat–daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui studi kasus nyata di Kawasan Timur Indonesia.						

	CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam praktik birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan regulasi hukum tata pemerintahan dan kode etik aparatur sipil negara, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang argumentatif dan bertanggung jawab.			
	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi (technopreneurship) yang merespons kebutuhan masyarakat lokal—khususnya di Kawasan Timur Indonesia—secara kreatif, kolaboratif, dan adaptif, disajikan dalam bentuk proposal inovasi layanan dengan analisis kelayakan etis dan sosial.			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar etika, filsafat moral, dan tiga teori etika pemerintahan (utilitarisme, deontologi, keutamaan) serta mengaitkannya dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.			
	Sub-CPMK2	Membandingkan landasan normatif antikorupsi dalam regulasi Indonesia (UU No. 28/1999, UU No. 20/2001, dan Kode Etik ASN) dengan kerangka teori etika pemerintahan yang telah dipelajari, serta menilai relevansinya sebagai instrumen pencegahan korupsi.			
	Sub-CPMK3	Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui studi kasus nyata di Kawasan Timur Indonesia (pemerintah provinsi/kabupaten/kota).			
	Sub-CPMK4	Menganalisis penerapan prinsip responsivitas dan etika pemerintahan desa dalam kerangka hubungan pusat–daerah melalui studi kasus penyelenggaraan pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK5	Mengevaluasi kasus pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan regulasi hukum tata pemerintahan dan Kode Etik ASN, menghasilkan penilaian tertulis yang argumentatif.			
	Sub-CPMK6	Merumuskan rekomendasi perbaikan etika birokrasi yang argumentatif dan bertanggung jawab atas kasus pelanggaran etika yang telah dievaluasi, dengan mempertimbangkan konteks regulasi dan nilai integritas aparatur.			
	Sub-CPMK7	Merancang konsep inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi (technopreneurship) yang merespons kebutuhan spesifik masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, disertai analisis kelayakan etis dan sosial awal.			
	Sub-CPMK8	Menyajikan proposal inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi secara lengkap—memuat latar belakang, desain solusi, analisis kelayakan etis-sosial, dan rencana implementasi—secara kolaboratif, kreatif, dan adaptif.			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4
	Sub-CPMK1	√	—	—	—
	Sub-CPMK2	√	—	—	—
	Sub-CPMK3	—	√	—	—
	Sub-CPMK4	—	√	—	—
	Sub-CPMK5	—	—	√	—
	Sub-CPMK6	—	—	√	—
	Sub-CPMK7	—	—	—	√
	Sub-CPMK8	—	—	—	√

	<table><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Jumlah	2	2	2	2																																																																	
Jumlah	2	2	2	2																																																																			
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																																																						
	<table><tr><td></td><td>CPL-01 (%)</td><td>CPL-02 (%)</td><td>CPL-03 (%)</td><td>CPL-10 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td></td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td></td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>7</td><td></td><td>7</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>7</td><td></td><td>7</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td>4</td><td></td><td></td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>37</td><td>25</td><td>28</td><td>10</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>		CPL-01 (%)	CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	8	7			15	2	Sub-CPMK2	4	3			7	1	Sub-CPMK3		8	7		15	2	Sub-CPMK4		7	7		14	2	Sub-CPMK5	7		7		14	2	Sub-CPMK6	7		7		14	2	Sub-CPMK7	7			7	14	2	Sub-CPMK8	4			3	7	1		37	25	28	10	100	14
	CPL-01 (%)	CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																																	
Sub-CPMK1	8	7			15	2																																																																	
Sub-CPMK2	4	3			7	1																																																																	
Sub-CPMK3		8	7		15	2																																																																	
Sub-CPMK4		7	7		14	2																																																																	
Sub-CPMK5	7		7		14	2																																																																	
Sub-CPMK6	7		7		14	2																																																																	
Sub-CPMK7	7			7	14	2																																																																	
Sub-CPMK8	4			3	7	1																																																																	
	37	25	28	10	100	14																																																																	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Etika Pemerintahan (3 SKS) mengkaji landasan filosofis dan normatif penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, mencakup teori etika (utilitarisme, deontologi, dan etika keutamaan), prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta antikorupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia—termasuk hubungan pusat–daerah dan pemerintahan desa—dengan penekanan pada konteks birokrasi di Kawasan Timur Indonesia. Mata kuliah ini berkedudukan sebagai mata kuliah wajib prodi yang mengintegrasikan Bahan Kajian Teori dan Sistem Pemerintahan (BK-02), Hukum, Kelembagaan, dan Birokrasi Pemerintahan (BK-03), serta Etika, Integritas, Kebangsaan, dan Technopreneurship (BK-12) sebagai penciri UNISAN, sehingga menjadi simpul yang menghubungkan kompetensi teoritis ilmu pemerintahan dengan kecakapan praktis beretika. Melalui pendekatan Case-Based Learning dan Project-Based Learning, mahasiswa secara progresif bergerak dari pemahaman konsep menuju analisis kasus pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam praktik birokrasi daerah, hingga perancangan proposal inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang memenuhi standar kelayakan etis dan sosial. Mata kuliah ini relevan dengan CPL-01, CPL-02, CPL-03, dan CPL-10, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai ICHSA-N—khususnya integritas, kreativitas, adaptabilitas, dan nasionalisme—sebagai karakter aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan inovatif.																																																																						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar etika dan filsafat moral; 2. Teori etika: utilitarisme, deontologi, keutamaan; 3. Etika pemerintahan sebagai norma penyelenggaraan negara; 4. Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; 5. Responsivitas dan prinsip antikorupsi birokrasi; 6. Sistem pemerintahan Indonesia dan hubungan pusat–daerah;																																																																						

	7. Hukum tata pemerintahan dan kelembagaan birokrasi; 8. Kode etik ASN dan pengelolaan konflik kepentingan; 9. Pemerintahan desa dan etika lokal Kawasan Timur Indonesia; 10. Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; 11. Etika pelayanan publik berbasis teknologi; 12. Rancangan inovasi layanan publik beretika lokal.						
Pustaka	Utama :						
	(1) Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. 4th Edition. Routledge; (2) Johnson, C. E. (2018). Meeting the Ethical Challenges of Leadership: Casting Light or Shadow. 6th Edition. SAGE Publications; (3) Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. SAGE Publications; (4) Osborne, S. P. (Ed.). (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Routledge; (5) Badan Kepegawaian Negara. (2021). Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. BKN; (6) Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Buku Panduan Integritas dan Antikorupsi untuk Aparatur Sipil Negara. KPK.						
	Pendukung :						
	(1) Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. Buku Saku Memahami Gratifikasi. KPK RI; (2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021. Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Kementerian PANRB RI; (3) Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretariat Negara; (4) Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara; (5) Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Etika ASN. LAN RI.						
Dosen Pengampu	Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.						
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar etika, filsafat moral, dan tiga teori etika pemerintahan (utilitarisme,	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan pengertian etika,	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi paparan interaktif (30	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar (10-15	Bahan Kajian: • Pengertian dan ruang lingkup etika serta	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	deontologi, keutamaan) serta mengaitkannya dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.	moralitas, dan filsafat moral serta perbedaan ketiganya secara tepat menggunakan referensi akademik • Menguraikan tiga teori etika utama (utilitarisme, deontologi, dan etika keutamaan) beserta tokoh dan asumsi dasarnya • Menghubungkan masing-masing teori etika dengan contoh konkret sikap penyelenggara pemerintahan yang berintegritas • Menampilkan sikap kritis dan terbuka dalam diskusi konsep etika sebagai landasan nilai Integrity ICHSA-N	Kuis identifikasi teori etika: mahasiswa mengklasifikasikan pernyataan sikap penyelenggara pemerintahan ke dalam teori utilitarisme, deontologi, atau keutamaan; dinilai berdasarkan ketepatan klasifikasi dan kejelasan alasan (minimal 3 alasan per jawaban) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons dalam diskusi kelas pembuka; menunjukkan sikap menghargai pendapat berbeda sebagai praktik	menit) menggunakan PPT untuk mengklarifikasi konsep dan teori etika, dilanjutkan diskusi kelompok kecil (4-5 orang) menganalisis kasus singkat perilaku pejabat publik dari lembar kasus yang dibagikan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan hasil analisis kasus (5 menit per kelompok), dosen memberikan umpan balik langsung dan menyimpulkan kaitan teori etika dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berintegritas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kasus perilaku pejabat publik nyata (bersumber dari media atau laporan lembaga	menit) tentang perbedaan etika, moralitas, dan filsafat moral serta peta konsep tiga teori etika ke Google Classroom/Moodle sebelum pertemuan luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video pengantar, membaca bab terkait dari Johnson (2018) dan Denhardt & Denhardt (2015), lalu mengisi lembar pra-belajar berupa tiga pertanyaan reflektif yang diunggah ke forum diskusi LMS MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelusuri satu berita singkat tentang pelanggaran atau penghargaan etika pejabat publik dan	filsafat moral; • Teori utilitarisme: prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang; • Teori deontologi: kewajiban moral dan prinsip kategoris Kant; • Teori etika keutamaan: karakter, kebajikan, dan integritas pemimpin; • Kaitan teori etika dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berintegritas; Pustaka: Johnson (2018); Denhardt & Denhardt (2015); Kooiman (2003).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			nilai Harmony ICHSA-N; minimal satu kontribusi substantif per mahasiswa yang tercatat fasilitator Tugas: Refleksi tertulis individu: membandingkan satu teori etika pilihan dengan satu contoh tindakan nyata penyelenggara pemerintahan; panjang 300-400 kata, dikumpulkan via LMS sebelum pertemuan minggu ke-2	pengawas) untuk mengoperasionalkan tiga teori etika dalam konteks pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menulis refleksi tertulis yang membandingkan satu teori etika (pilihan: utilitarisme, deontologi, atau keutamaan) dengan satu contoh tindakan nyata penyelenggara pemerintahan yang ditemukan dari sumber berita atau laporan resmi. Refleksi harus memuat: (1) definisi teori yang dipilih, (2) deskripsi singkat tindakan pejabat, (3) penilaian apakah tindakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan teori, dan (4) pernyataan nilai Integrity sebagai fondasi penyelenggara pemerintahan menurut pandangan mahasiswa	menghubungkannya dengan teori etika yang dibaca, sebagai bahan diskusi pertemuan luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sendiri. Penggunaan Generative AI sebagai alat bantu eksplorasi konsep diperbolehkan dengan kewajiban menyertakan pernyataan transparansi penggunaan AI di bagian akhir refleksi. Deliverable: Dokumen refleksi tertulis individu (Google Docs atau Word), 300-400 kata, diunggah ke LMS (Google Classroom/Moodle) sebelum pukul 23.59 hari sebelum pertemuan minggu ke-2			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Latihan analisis kasus tertulis: mahasiswa diberikan satu skenario kebijakan publik kontroversial dan diminta menganalisisnya	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi panel terstruktur: kelas dibagi tiga kelompok mewakili masing-masing teori etika; setiap kelompok mempresentasikan argumen teorinya terhadap kasus kebijakan yang sama (10 menit per kelompok), diikuti sesi tanya-jawab	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan tambahan berupa ringkasan norma good governance (akuntabilitas, transparansi, partisipasi) dan panduan diskusi panel ke LMS; menyediakan forum diskusi asinkron bertema 'Teori etika mana yang	Bahan Kajian: • Aplikasi teori utilitarisme dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; • Aplikasi teori deontologi dalam kewajiban moral penyelenggara negara;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dari sudut pandang ketiga teori etika secara berurutan; dinilai berdasarkan kedalaman argumen per teori, konsistensi logika, dan kemampuan menyimpulkan posisi etis yang paling tepat untuk konteks pemerintahan (bobot: ketajaman analisis 60%, kejelasan kesimpulan 40%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi panel kelas: mahasiswa mempertahankan posisi teori etika yang ditugaskan (bukan pilihan pribadi) secara argumentatif;	antarkelompok (15 menit), dan dosen menutup dengan sintesis kaitan ketiga teori dengan norma penyelenggaraan negara (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyajikan argumen kelompok menggunakan PPT atau Canva (maksimal 5 slide per kelompok); dosen mencatat poin kunci di papan tulis untuk membangun peta konsep bersama yang menghubungkan teori etika dengan prinsip good governance MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan format debat akademik: analisis satu kasus kebijakan publik dari tiga sudut pandang teori etika secara bersamaan untuk	paling relevan untuk birokrasi Indonesia dan mengapa?' (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan yang diunggah dan memberikan respons awal di forum diskusi LMS (minimal 150 kata per mahasiswa) sebelum pertemuan luring; mahasiswa juga menyiapkan argumen tertulis singkat untuk posisi teori yang akan dipertahankan dalam diskusi panel MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah kasus kebijakan publik yang disediakan dosen di LMS dan mengidentifikasi dimensi etis dari perspektif masing-masing teori	• Aplikasi etika keutamaan dalam karakter pemimpin birokrasi; • Prinsip-prinsip good governance sebagai norma penyelenggaraan negara; • Komparasi kekuatan dan keterbatasan tiga teori etika dalam konteks pemerintahan; Pustaka: Johnson (2018); Denhardt & Denhardt (2015); Kooiman (2003); Osborne (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dinilai berdasarkan kejelasan argumen, penggunaan referensi, dan sikap menghormati pandangan kelompok lain sebagai praktik nilai Harmony ICHSA-N Tugas: Makalah analisis komparatif: membandingkan penerapan dua dari tiga teori etika dalam satu kasus kebijakan publik di Indonesia; 500-600 kata, dengan minimal dua referensi dari pustaka yang ditetapkan, dikumpulkan via LMS	mempertajam kemampuan komparasi dan penilaian etis (C5-C6) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun makalah analisis komparatif yang membandingkan penerapan dua dari tiga teori etika (pilihan mahasiswa) dalam menganalisis satu kasus kebijakan publik nyata di Indonesia yang berdampak luas. Makalah memuat: (1) deskripsi singkat kasus dan konteks kebijakannya, (2) analisis kasus dari perspektif teori etika pertama, (3) analisis kasus dari perspektif teori etika kedua, (4) perbandingan kekuatan dan kelemahan kedua teori dalam konteks tersebut, dan (5) rekomendasi pendekatan etis yang paling tepat disertai alasan. Makalah	sebagai persiapan diskusi panel luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				harus menunjukkan perkembangan dari refleksi minggu ke-1 dengan menggunakan minimal dua referensi dari pustaka yang ditetapkan. Deliverable: Makalah analisis komparatif individu (Google Docs atau Word), 500-600 kata, minimal dua kutipan dari pustaka yang ditetapkan, diunggah ke LMS paling lambat pukul 23.59 dua hari sebelum pertemuan minggu ke-3			
3	Sub-CPMK2: Membandingkan landasan normatif antikorupsi dalam regulasi Indonesia (UU No. 28/1999, UU No. 20/2001, dan Kode Etik ASN) dengan kerangka teori etika pemerintahan yang telah dipelajari, serta menilai relevansinya sebagai instrumen pencegahan korupsi.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi pokok-pokok pengaturan antikorupsi dalam UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, dan Kode Etik ASN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2021	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Latihan pemetaan regulasi: mahasiswa mengisi matriks komparasi tiga kolom (UU 28/1999, UU 20/2001, Kode Etik ASN) untuk lima dimensi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan sintesis tiga regulasi antikorupsi menggunakan PPT (20 menit), dilanjutkan diskusi kelas berbasis kasus gratifikasi ASN yang ditayangkan melalui video pendek (dari kanal resmi KPK); dosen memandu mahasiswa mengisi dan mendiskusikan matriks	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rangkuman ketiga regulasi antikorupsi (dalam bentuk infografis atau tabel sinopsis) dan tautan dokumen resmi ke LMS; menyediakan panduan pengisian matriks komparasi beserta contoh isian satu baris (via LMS;	Bahan Kajian: • Pokok pengaturan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN; • Pokok pengaturan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Membandingkan landasan normatif antikorupsi dalam ketiga regulasi tersebut dengan kerangka teori etika (utilitarisme, deontologi, keutamaan) yang telah dikuasai pada minggu 1-2 - Menilai relevansi masing-masing regulasi sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam praktik birokrasi Indonesia menggunakan argumen berbasis teori dan data - Menghayati nilai Integrity ICHSA-N melalui analisis kasus gratifikasi dan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan prinsip antikorupsi KPK	subjek hukum, jenis pelanggaran, sanksi, mekanisme pengawasan, dan kesesuaian dengan teori etika; dinilai berdasarkan ketepatan isi matriks dan ketajaman catatan analitis per sel (bobot: kelengkapan 40%, analisis komparatif 60%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi studi kasus pelanggaran etika ASN: mahasiswa diminta mengajukan minimal satu pertanyaan substantif atau satu sanggahan	komparasi bersama sebelum kelompok melanjutkan secara mandiri (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok kecil (4-5 orang) mendiskusikan dan melengkapi matriks komparasi, lalu menyampaikan temuan kritis satu kelompok secara lisan (5 menit); dosen menutup dengan pembahasan relevansi ketiga regulasi dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia terkini MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kasus pelanggaran etika ASN aktual yang dikaitkan dengan ketiga regulasi antikorupsi dan teori etika yang telah dipelajari; mendorong	sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah dokumen regulasi yang diunggah, mengunduh template matriks komparasi, dan mengisi draf awal matriks secara mandiri sebelum pertemuan luring; mahasiswa juga membaca Buku Saku Gratifikasi KPK (2021) dan mencatat tiga poin kunci yang akan dibawa ke diskusi kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah satu kasus gratifikasi ASN yang dipublikasikan KPK, mengidentifikasi pasal regulasi yang dilanggar, dan menghubungkannya dengan teori deontologi (kewajiban) maupun	- Kode Etik ASN berdasarkan Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2021; - Konsep gratifikasi dan konflik kepentingan dalam praktik birokrasi; - Relevansi regulasi antikorupsi sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis teori etika; Pustaka: Badan Kepegawaian Negara (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Republik Indonesia (2014); Lembaga Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berbasis regulasi; dinilai berdasarkan relevansi dan penggunaan referensi regulasi yang tepat; sikap jujur dalam menilai kelemahan regulasi mencerminkan nilai Integrity ICHSA-N Tugas: Matriks komparasi dan analisis naratif: memetakan persamaan dan perbedaan ketiga regulasi antikorupsi dalam tabel terstruktur disertai paragraf analisis relevansinya sebagai instrumen pencegahan korupsi (400-500	kemampuan menilai (C5) dan membangun argumen berbasis norma (C6) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun matriks komparasi tiga regulasi antikorupsi (UU No. 28/1999, UU No. 20/2001, dan Peraturan BKN No. 17/2021 tentang Kode Etik ASN) yang mencakup lima dimensi: subjek hukum, jenis pelanggaran yang diatur, sanksi, mekanisme pengawasan, dan kesesuaian dengan salah satu teori etika (pilihan mahasiswa). Matriks dilengkapi dengan bagian naratif analisis yang menilai relevansi ketiga regulasi sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam birokrasi Indonesia masa kini, termasuk identifikasi celah (gap) yang masih ada. Tugas ini merupakan	etika keutamaan sebagai persiapan diskusi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kata bagian naratif), dikumpulkan via LMS	pengembangan dari kemampuan komparasi yang dibangun pada minggu ke-2. Deliverable: Dokumen berisi matriks komparasi terstruktur (tabel 3 kolom x 5 baris) dan bagian naratif analisis (400-500 kata), disusun dalam Google Docs atau Word, diunggah ke LMS paling lambat pukul 23.59 dua hari sebelum pertemuan minggu ke-4			
4,5	Sub-CPMK3: Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui studi kasus nyata di Kawasan Timur Indonesia (pemerintah provinsi/kabupaten/kota).	Mahasiswa mampu: - Menguraikan konsep akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka normatif dan teoritis - Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada kasus nyata pemerintah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Analisis kasus tertulis (in-class): mahasiswa membaca lembar kasus singkat pemerintah daerah KTI yang disiapkan dosen, lalu menjawab tiga pertanyaan analitik tentang:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi hasil analisis awal tiap kelompok (7 menit per kelompok, maksimal empat kelompok); kelas memberikan umpan balik terstruktur menggunakan lembar peer-review singkat; dosen menutup dengan sintesis tentang pola kesenjangan akuntabilitas-transparansi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan studi kasus kelompok (termasuk kriteria pemilihan daerah KTI, sumber data yang dapat digunakan, dan rubrik penilaian) serta bahan bacaan ringkas tentang konsep akuntabilitas dan transparansi dari perspektif New Public Service ke LMS (via	Bahan Kajian: - Konsep akuntabilitas: jenis-jenis dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pemerintahan; - Konsep transparansi: keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam tata kelola; - Prinsip New Public Service: melayani warga	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		provinsi, kabupaten, atau kota di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka teori etika dan regulasi yang telah dikuasai • Mengidentifikasi kesenjangan antara norma akuntabilitas dan transparansi yang berlaku dengan praktik aktual yang ditemukan dalam kasus yang dianalisis • Merumuskan rekomendasi awal perbaikan tata kelola yang kontekstual untuk daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai wujud nilai Service dan Nationalism ICHSA-N	(1) bentuk akuntabilitas/transparansi yang diterapkan atau dilanggar, (2) regulasi yang relevan, dan (3) rekomendasi satu langkah perbaikan; dinilai berdasarkan ketajaman identifikasi masalah, ketepatan rujukan regulasi, dan relevansi rekomendasi (bobot masing-masing 30%, 30%, 40%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi panel kasus daerah KTI: mahasiswa menyampaikan temuan analisis kelompoknya	yang khas di KTI dan kaitannya dengan kerangka etika pemerintahan serta regulasi antikorupsi yang dipelajari minggu ke-3 (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok menyajikan temuan menggunakan PPT atau Canva (maksimal 6 slide); pasca-presentasi, kelompok merevisi laporan berdasarkan masukan kelas dan dosen sebelum pengumpulan final via LMS; dosen menunjukkan contoh laporan BPK KTI melalui LCD proyektor sebagai bahan komparasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi analitik: kelompok mempresentasikan hasil analisis dokumen publik pemerintah daerah KTI,	LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Setiap kelompok (4-5 mahasiswa) mengakses dokumen publik pemerintah daerah KTI yang dipilih (LKPD BPK, laporan keterbukaan informasi, atau portal daerah) dan membuat draf kerangka analisis bersama di Google Docs; mahasiswa juga membaca bagian relevan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai referensi normatif MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok secara daring merintis proyek analisis kasus pemerintah daerah KTI dengan membagi tugas penelusuran dokumen, identifikasi isu akuntabilitas, dan	bukan mengarahkan pasar; • Analisis kasus penerapan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia; • Kesenjangan norma-praktik akuntabilitas dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Kooiman (2003); Osborne (2010); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			secara ringkas dan merespons temuan kelompok lain dengan argumen berbasis regulasi atau teori; sikap kritis namun konstruktif mencerminkan nilai Integrity dan Service ICHSA-N; minimal satu tanggapan substantif per mahasiswa yang dicatat fasilitator Tugas: Laporan studi kasus kelompok: analisis akuntabilitas dan transparansi satu pemerintah daerah KTI (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan dokumen publik (LKPD, laporan BPK, atau	mengintegrasikan kerangka teori etika (minggu 1-2) dan norma regulasi (minggu 3) dalam menilai penerapan akuntabilitas dan transparansi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok mahasiswa (4-5 orang) menyusun laporan studi kasus yang menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada satu pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (pilihan: provinsi, kabupaten, atau kota). Sumber data yang digunakan adalah dokumen publik resmi seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit BPK, laporan keterbukaan informasi publik, atau kebijakan layanan publik daerah yang tersedia di	penyusunan kerangka laporan sebelum pertemuan luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kebijakan keterbukaan informasi); 700-900 kata, mencakup deskripsi kasus, analisis kesenjangan norma-praktik, dan rekomendasi; dikumpulkan via LMS	portal resmi. Laporan memuat: (1) profil singkat pemerintah daerah yang dipilih dan konteks tata kelolanya, (2) analisis bentuk akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan beserta bukti dokumen, (3) identifikasi kesenjangan antara norma yang berlaku (dikaitkan dengan regulasi minggu ke-3 dan prinsip good governance) dengan praktik aktual, dan (4) minimal dua rekomendasi perbaikan yang kontekstual dan realistis untuk daerah tersebut. Tugas ini merupakan integrasi analitik dari konsep dan norma yang dibangun pada minggu 1 hingga 3, sekaligus sebagai bahan persiapan menuju ujian tengah semester. Deliverable: Laporan studi kasus kelompok (Google Docs atau Word), 700-900 kata tidak termasuk tabel/lampiran, dilengkapi			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				daftar dokumen publik yang dirujuk, diunggah ke LMS paling lambat pukul 23.59 tiga hari sebelum pertemuan minggu ke-5; file presentasi (PPT atau Canva, maksimal 6 slide) diunggah ke LMS sebelum pertemuan luring minggu ke-4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat (10 butir pilihan ganda berbasis kasus) mengukur kemampuan mahasiswa membedakan bentuk akuntabilitas dan menerapkan prinsip transparansi pada skenario OPD daerah; jawaban dinilai berdasarkan ketepatan konsep	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi kelas terstruktur: presentasi singkat temuan per kelompok (5 menit/kelompok), sesi tanya-jawab kritis antar-kelompok, dan sintesis dosen tentang pola umum masalah akuntabilitas di Kawasan Timur Indonesia; dosen memutar cuplikan video kasus pelanggaran transparansi sebagai pemantik (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video mini-lecture (15–20 menit) di LMS yang memaparkan kerangka akuntabilitas-transparansi dan menyajikan dua data/dokumen publik OPD Kawasan Timur Indonesia sebagai bahan kasus; dosen membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemandu (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Konsep dan dimensi akuntabilitas pemerintahan: horizontal, vertikal, dan diagonal; • Prinsip transparansi dalam New Public Service dan New Public Governance; • Regulasi akuntabilitas di Indonesia: UU ASN, Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024; • Studi kasus penerapan akuntabilitas OPD di Kawasan Timur	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dan presisi argumen analitis Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok Case-Based Learning dinilai dari frekuensi kontribusi substantif, kemampuan mengaitkan kasus dengan teori, dan sikap menghargai perspektif berbeda (nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N); dosen mencatat rekam jejak kontribusi per mahasiswa Tugas: Laporan analisis kasus akuntabilitas dan transparansi salah	Mahasiswa dalam kelompok (4–5 orang) mempresentasikan hasil telaah daring, menerima umpan balik rekan dan dosen, lalu menyempurnakan analisis kasus untuk diserahkan sebagai laporan tertulis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi panel kelompok berbasis dokumen publik OPD; tiap kelompok mempertahankan analisis kesenjangan akuntabilitas dan menerima sanggahan berbasis data dari kelompok lain Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun laporan analisis akuntabilitas dan transparansi satu OPD pemerintah daerah di	Mahasiswa mengunduh bahan bacaan wajib dari LMS, menelaah dokumen publik OPD yang diunggah dosen, mendiskusikan temuan awal di forum LMS sebelum sesi luring, dan menyusun draf poin analisis secara individu menggunakan Google Docs MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah dokumen LKPJ/LAKIP/laporan keuangan OPD daerah secara mandiri daring, lalu mengidentifikasi indikasi kesenjangan akuntabilitas sebagai bahan diskusi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Indonesia; • Faktor penghambat transparansi birokrasi daerah: struktural, kultural, dan kapasitas; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Osborne (2010); Kementerian PANRB (2021); Republik Indonesia (2014); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			satu OPD di provinsi/kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia; panjang 800–1.000 kata; memuat: identifikasi masalah, analisis kesenjangan regulasi-praktik, dan tiga rekomendasi konkret	Kawasan Timur Indonesia. Laporan memuat: (1) profil singkat OPD dan konteks daerah, (2) analisis penerapan prinsip akuntabilitas vertikal dan horizontal mengacu pada kerangka New Public Governance dan Road Map RB 2020–2024, (3) identifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta (4) tiga rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dan kontekstual. Penggunaan Generative AI sebagai alat bantu eksplorasi konsep harus dinyatakan secara transparan pada lembar pernyataan integritas yang dilampirkan (nilai Integrity ICHSA-N). Deliverable: Laporan tertulis 800–1.000 kata dalam format PDF diunggah ke LMS, dilampiri lembar pernyataan integritas akademik; batas			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengumpulan: H-1 sebelum sesi minggu ke-6			
6,7	Sub-CPMK4: Menganalisis penerapan prinsip responsivitas dan etika pemerintahan desa dalam kerangka hubungan pusat–daerah melalui studi kasus penyelenggaraan pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan konsep responsivitas pemerintahan dalam kerangka New Public Service dan kaitannya dengan hubungan pusat–daerah berdasarkan UU Desa - Menganalisis penerapan prinsip responsivitas kepala desa dan perangkat desa dalam merespons kebutuhan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia - Membedakan etika lokal yang berlaku di komunitas desa Kawasan Timur Indonesia dengan norma etika pemerintahan formal dalam UU ASN dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada kuis; penilaian utama melalui diskusi kelompok dan tugas analisis; dosen dapat mengajukan pertanyaan lisan terstruktur selama diskusi untuk mengecek penguasaan konsep responsivitas tiap mahasiswa Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok dinilai berdasarkan kemampuan mengaitkan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi kelompok berbasis narasi kasus; tiap kelompok (4–5 orang) menganalisis aspek responsivitas dan tegangan etika lokal–formal, lalu mempresentasikan temuan dalam forum kelas; dosen memberi umpan balik komparatif antar-kelompok dan menegaskan relevansi nilai Service dan Nationalism ICHSA-N dalam tata kelola desa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok memperdalam analisis kasus berbasis diskusi, menerima sanggahan berbasis data dari kelompok lain, lalu menyempurnakan lembar kerja individu untuk	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah di LMS: (1) bahan bacaan ringkas tentang konsep responsivitas dan UU Desa, (2) satu narasi kasus tertulis tentang pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia (mis. desa di Maluku, NTT, atau Papua), dan (3) panduan pengerjaan lembar kerja; dosen membuka forum tanya-jawab asinkron (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan di LMS, mempelajari narasi kasus, menyusun peta awal pemangku kepentingan desa secara individual menggunakan Google Docs, dan	Bahan Kajian: - Konsep responsivitas dalam New Public Service: pelayanan berbasis kebutuhan warga; - Hubungan pusat–daerah dan otonomi desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014; - Etika lokal komunitas desa Kawasan Timur Indonesia: nilai adat dan norma sosial; - Tegangan etika formal (kode etik ASN) dan etika lokal dalam pemerintahan desa; - Strategi responsivitas pemerintahan desa yang beretika dan kontekstual; Pustaka:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kode Etik PNS • Mengidentifikasi potensi konflik antara nilai adat lokal dan tuntutan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel • Merumuskan strategi responsivitas pemerintahan desa yang mengintegrasikan etika lokal dan prinsip good governance	konsep responsivitas dengan fakta kasus desa Kawasan Timur Indonesia, kualitas pertanyaan yang diajukan, dan sikap menghargai keberagaman nilai lokal (nilai Harmony dan Service ICHSA-N) Tugas: Lembar Kerja Analisis Responsivitas Desa: analisis terstruktur terhadap satu kasus pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia; panjang 600–800 kata; memuat peta pemangku kepentingan,	dikumpulkan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kelompok terstruktur dengan pembagian peran (analisis regulasi, analisis etika lokal, juru bicara masyarakat, penyusun rekomendasi) untuk mensimulasikan deliberasi responsif di tingkat desa Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyelesaikan Lembar Kerja Analisis Responsivitas Desa berdasarkan satu kasus pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia yang dikaji selama diskusi. Lembar kerja memuat: (1) peta pemangku kepentingan desa, (2) analisis tingkat	mengunggah draf peta ke forum LMS untuk mendapat komentar rekan sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah narasi kasus pemerintahan desa secara daring untuk membangun pemahaman awal tentang dinamika responsivitas dan etika lokal sebelum diskusi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Denhardt & Denhardt (2015); Republik Indonesia (2014); Badan Kepegawaian Negara (2021); Kooiman (2003); Lembaga Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			analisis responsivitas, dan identifikasi tegangan etika lokal–formal	responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat mengacu pada prinsip New Public Service, (3) identifikasi tegangan antara nilai etika lokal dan kode etik formal, serta (4) strategi konkret mengintegrasikan keduanya. Tugas ini merupakan dasar analisis yang akan dikembangkan lebih lanjut di minggu ke-7. Deliverable: Lembar Kerja Analisis Responsivitas Desa 600–800 kata dalam format PDF diunggah ke LMS; batas pengumpulan: H-1 sebelum sesi minggu ke-7			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada kuis; penilaian melalui presentasi kelompok dan laporan analisis;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok (7–10 menit per kelompok, diikuti 5 menit tanya-jawab); setelah semua presentasi, dosen memimpin sintesis kelas	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penyusunan laporan analisis kelompok dan rubrik penilaian presentasi ke LMS; dosen membuka sesi konsultasi daring	Bahan Kajian: • Sintesis analisis etika multi-perspektif: deontologi, utilitarisme, dan keutamaan dalam kasus desa;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kualitas argumen dinilai dari ketepatan penggunaan teori etika, koherensi analisis, dan kelayakan rekomendasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dinilai berdasarkan kualitas pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain, respons terhadap sanggahan, dan kontribusi pada diskusi sintesis akhir; sikap kolaboratif dan sportivitas akademik dinilai oleh dosen dan rekan (nilai Harmony ICHSA-	tentang pola umum masalah etika pemerintahan desa Kawasan Timur Indonesia dan menghubungkannya dengan materi UTS; dosen menegaskan nilai Nationalism melalui refleksi peran desa sebagai ujung tombak pemerintahan Pancasila (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan laporan analisis, mempertahankan rekomendasi dari sanggahan kelompok lain, dan mencatat umpan balik untuk revisi akhir laporan; mahasiswa mengisi lembar peer-review singkat untuk kelompok yang dipresentasikan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi dan debat	asinkron via forum LMS untuk kelompok yang membutuhkan klarifikasi sebelum presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Kelompok mahasiswa berkolaborasi menyusun laporan menggunakan Google Docs bersama; setiap anggota menyumbang bagian sesuai pembagian peran; draf laporan diunggah ke LMS H-2 sebelum sesi luring untuk mendapat umpan balik awal dosen MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mahasiswa mengintegrasikan temuan minggu ke-6 (lembar kerja individu) ke dalam laporan analisis kelompok yang lebih komprehensif dan	• Evaluasi kebijakan desa berbasis prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas; • Rekomendasi tata kelola pemerintahan desa yang integratif: etika lokal dan norma formal; • Refleksi nilai Pancasila dan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; • Persiapan konseptual menuju UTS: ringkasan kerangka etika pemerintahan minggu 1–7; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Johnson (2018); Republik Indonesia (2014); Badan Kepegawaian Negara (2021); Lembaga Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			N) Tugas: Laporan Analisis Kasus Pemerintahan Desa kelompok: analisis komprehensif satu kasus nyata pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia; panjang 1.200–1.500 kata; memuat landasan teori, analisis multi-perspektif, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi operasional	akademik antar-kelompok berbasis laporan analisis kasus; dosen bertindak sebagai fasilitator dan penilai substantif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (4–5 orang) menyusun laporan analisis komprehensif terhadap satu kasus nyata penyelenggaraan pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia. Laporan memuat: (1) ringkasan kasus dan konteks daerah, (2) analisis pelanggaran atau kelemahan etika menggunakan minimal dua teori etika yang telah dikaji (mis. deontologi dan keutamaan), (3) evaluasi kebijakan desa terhadap prinsip akuntabilitas-transparansi-responsivitas, (4) rekomendasi perbaikan yang operasional dan mengintegrasikan nilai	menyiapkan presentasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				etika lokal, serta (5) refleksi kelompok tentang nilai Integrity dan Service ICHSA-N dalam konteks pemerintahan desa. Laporan dikembangkan dari lembar kerja individu minggu ke-6 dan merupakan produk akhir yang dinilai sebelum UTS. Deliverable: Laporan kelompok 1.200–1.500 kata dalam format PDF diunggah ke LMS, disertai slide presentasi (Canva/PowerPoint, 8–12 slide) yang dikumpulkan bersama laporan; batas pengumpulan laporan final: H+2 setelah sesi presentasi luring			
8		Mahasiswa mampu: Menjelaskan secara akurat konsep dasar etika, teori moral (utilitarisme, deontologi, keutamaan), dan prinsip etika	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian tulis individual (waktu 90 menit); format campuran: pilihan ganda berbasis	BP — Mekanisme kuliah: Dosen atau pengawas memimpin pelaksanaan UTS di ruang kelas sesuai jadwal; dosen membacakan tata tertib ujian, membagikan lembar soal dan jawaban,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah pengumuman teknis UTS (jadwal, ruangan, materi cakupan, tata tertib) ke LMS H-3 sebelum ujian; dosen membuka sesi tanya-jawab asinkron di	Bahan Kajian: Ringkasan konsep dasar etika dan teori moral: utilitarisme, deontologi, keutamaan (minggu 1–4);	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan yang dikaji pada minggu 1–4 • Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada kasus pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia sesuai capaian minggu ke-5 • Menganalisis penerapan responsivitas dan etika pemerintahan desa dalam hubungan pusat–daerah sesuai capaian minggu ke-6 dan ke-7 • Mengevaluasi kasus pelanggaran etika birokrasi menggunakan kerangka teori dan regulasi yang telah dikaji (UU ASN, Kode Etik PNS, Road Map RB) • Menyusun argumen tertulis yang koheren, logis, dan berbasis	kasus (20 butir, mengukur pemahaman konsep C2–C3), soal analisis kasus pendek (2 soal, mengukur kemampuan analitis C4), dan satu esai analitis (mengukur kemampuan evaluasi C5 terhadap kasus etika pemerintahan Kawasan Timur Indonesia); penilaian menggunakan rubrik analitis yang memeriksa ketepatan konsep, kedalaman argumen, dan konsistensi penggunaan teori Partisipasi kelas & laboratorium:	memantau kelancaran ujian, dan mengumpulkan hasil jawaban mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UTS secara individual dan mandiri dalam waktu 90 menit; jawaban ditulis tangan di lembar jawaban yang disediakan; setelah ujian selesai, dosen dapat memandu refleksi singkat (5 menit) tentang soal yang dianggap paling menantang MP — Metode Pembelajaran: Asesmen sumatif individual: ujian tertulis berbasis kasus yang mengukur integrasi capaian pembelajaran minggu 1–7 secara komprehensif	forum LMS untuk klarifikasi konsep yang belum dipahami mahasiswa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses rangkuman bahan kajian minggu 1–7 yang disiapkan mandiri, menelaah kembali laporan analisis kasus dan lembar kerja yang telah dikerjakan, dan berlatih mengonstruksi argumen analitis menggunakan contoh kasus dari LMS MP — Metode Pembelajaran: Self-Directed Learning: mahasiswa mengelola persiapan ujian secara mandiri dengan panduan cakupan materi dan contoh format soal yang diunggah dosen di LMS	• Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan (minggu 5); • Responsivitas dan etika pemerintahan desa dalam hubungan pusat–daerah (minggu 6–7); • Kode etik ASN dan regulasi tata kelola birokrasi Indonesia; • Integrasi analisis kasus etika pemerintahan Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Johnson (2018); Kooiman (2003); Osborne (2010); Badan Kepegawaian Negara (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Kementerian PANRB (2021); Republik Indonesia (2014); Lembaga	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bukti dalam menjawab soal analisis UTS	Mahasiswa menunjukkan integritas akademik selama ujian: tidak menyontek, tidak menggunakan sumber yang tidak diizinkan, dan mengerjakan secara mandiri sebagai wujud nilai Integrity ICHSA-N; dosen dan pengawas mencatat ketertiban pelaksanaan Tugas: Tidak ada tugas tambahan di luar ujian; mahasiswa dianjurkan menyiapkan catatan ringkas mandiri sebagai alat belajar sebelum UTS (tidak dikumpulkan)	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan tambahan di minggu UTS. Mahasiswa mempersiapkan diri secara mandiri untuk ujian yang mencakup seluruh materi minggu 1–7: konsep dasar etika dan filsafat moral, teori etika, etika pemerintahan, prinsip akuntabilitas-transparansi, serta responsivitas dan etika pemerintahan desa. Persiapan mandiri dapat memanfaatkan Generative AI sebagai alat bantu merangkum konsep, dengan tetap mengutamakan pemahaman kritis dan kemampuan argumentasi sendiri (nilai Integrity dan Adaptability ICHSA-N). Deliverable: Lembar jawaban UTS yang dikerjakan dan dikumpulkan langsung saat	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ujian luring; tidak ada pengumpulan digital			
9,10	Sub-CPMK5: Mengevaluasi kasus pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan regulasi hukum tata pemerintahan dan Kode Etik ASN, menghasilkan penilaian tertulis yang argumentatif.	Mahasiswa mampu: - Mengidentifikasi jenis pelanggaran etika dan konflik kepentingan pada kasus birokrasi pemerintahan daerah yang diberikan berdasarkan Kode Etik ASN dan regulasi hukum tata pemerintahan - Menganalisis akar penyebab pelanggaran etika dalam kasus birokrasi daerah dengan mengaitkan fakta kasus pada pasal-pasal UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan BKN No. 17 Tahun 2021 - Mengevaluasi tingkat pelanggaran etika pada kasus yang dikaji dengan menggunakan kerangka penilaian	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis singkat (15 menit, 5 butir analisis kasus pendek) mengukur kemampuan mahasiswa mengidentifikasi jenis pelanggaran etika dan merujuk pasal regulasi yang relevan; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi dan kejelasan alur argumentasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok Case-Based	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (10 menit) tentang kerangka evaluasi normatif kasus pelanggaran etika birokrasi daerah; dosen memfasilitasi diskusi kelompok kecil (4-5 mahasiswa) menggunakan dua kasus tertulis yang disiapkan dosen, satu kasus gratifikasi dan satu kasus konflik kepentingan di pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia; dosen memberikan umpan balik formatif pada presentasi temuan tiap kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi pelanggaran, memetakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video ceramah singkat (20-25 menit) di LMS yang menjelaskan kerangka evaluasi kasus pelanggaran etika birokrasi: tahapan identifikasi fakta, pemetaan norma yang dilanggar, dan penyusunan penilaian argumentatif; dosen membuka forum diskusi awal berupa pertanyaan pemantik tentang kasus gratifikasi atau konflik kepentingan di birokrasi daerah (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menonton video ceramah dosen, membaca ringkasan regulasi yang diunggah (Peraturan BKN No. 17	Bahan Kajian: - Kode etik ASN dan pengelolaan konflik kepentingan; - Hukum tata pemerintahan dan kelembagaan birokrasi; - Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; Pustaka: Badan Kepegawaian Negara (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Republik Indonesia (2014); Lembaga Administrasi Negara (2021).	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		normatif secara argumentatif dan terstruktur Menyajikan penilaian tertulis argumentatif atas kasus pelanggaran etika birokrasi daerah yang memuat identifikasi fakta, analisis normatif, dan kesimpulan evaluatif secara logis dan sistematis	Learning dinilai berdasarkan frekuensi dan kualitas kontribusi analisis (bukan sekadar setuju), kemampuan mengaitkan kasus dengan regulasi, serta sikap menghargai perspektif berbeda (nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N) Tugas: Lembar analisis kasus individu: mahasiswa memilih satu kasus pelanggaran etika birokrasi daerah di Kawasan Timur Indonesia (dapat bersumber dari pemberitaan resmi atau laporan	norma yang dilanggar, dan menyusun penilaian awal; tiap kelompok mempresentasikan temuan analisis (5 menit per kelompok); mahasiswa mencatat perbaikan argumen berdasarkan umpan balik dosen dan kelompok lain MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kolaboratif dua kasus birokrasi daerah secara terstruktur dengan panduan lembar kerja kasus yang memuat kolom fakta, norma yang dilanggar, dan penilaian evaluatif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun lembar analisis kasus pelanggaran etika birokrasi: memilih satu	Tahun 2021 dan kutipan UU ASN), menelusuri satu kasus pelanggaran etika birokrasi daerah dari sumber terpercaya, lalu merespons pertanyaan pemantik di forum diskusi LMS sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelaah kasus awal secara daring sebagai persiapan analisis mendalam di pertemuan luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			KPK/Ombudsman), mengidentifikasi jenis pelanggaran, memetakan norma yang dilanggar, dan menyusun evaluasi argumentatif; panjang 600-800 kata, dikumpulkan via LMS sebelum pertemuan Minggu 10	kasus nyata dari Kawasan Timur Indonesia (bersumber dari laporan KPK, Ombudsman, atau pemberitaan media nasional terverifikasi), mengidentifikasi jenis pelanggaran etika dan konflik kepentingan yang terjadi, memetakan pasal-pasal regulasi yang dilanggar (merujuk UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan BKN No. 17 Tahun 2021), serta menyusun penilaian evaluatif yang argumentatif dengan alur: deskripsi fakta, analisis normatif, dan kesimpulan penilaian. Penggunaan alat bantu Generative AI wajib dinyatakan secara transparan pada bagian akhir dokumen sebagai wujud nilai Integrity ICHSA-N. Deliverable: Dokumen lembar analisis kasus individu (format Google Docs atau Word, 600-800			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kata) yang memuat: (1) identitas kasus dan sumber referensi, (2) identifikasi jenis pelanggaran dan konflik kepentingan, (3) pemetaan norma/regulasi yang dilanggar beserta nomor pasal, (4) penilaian evaluatif argumentatif, dan (5) pernyataan transparansi penggunaan AI bila digunakan; dikumpulkan via LMS paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 10			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri di minggu ini; penilaian berpusat pada kualitas revisi dokumen analisis kasus dan kemampuan mengkritisi argumen rekan dalam sesi peer review; rubrik	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi peer review terstruktur (berpasangan atau kelompok tiga orang) di mana mahasiswa menyampaikan umpan balik lisan dan tertulis atas dokumen analisis rekan; dosen memimpin diskusi pleno (15 menit) untuk membahas pola kelemahan argumentasi yang ditemukan lintas kelompok dan mengklarifikasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan peer review tertulis di LMS beserta rubrik penilaian analisis kasus; dosen membuka sesi tanya-jawab daring (sinkron singkat 20 menit via Google Meet atau fitur konferensi LMS) untuk mendiskusikan pertanyaan mahasiswa seputar standar argumentasi normatif sebelum sesi peer review	Bahan Kajian: • Kode etik ASN dan pengelolaan konflik kepentingan; • Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; • Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penilaian mencakup: kedalaman analisis normatif (bobot 40%), koherensi alur argumentasi (30%), ketepatan rujukan regulasi (20%), dan kelengkapan unsur dokumen (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi peer review dan diskusi pleno dinilai berdasarkan kemampuan memberikan umpan balik konstruktif yang spesifik dan berbasis regulasi (bukan opini umum), serta keterbukaan menerima kritik	standar penilaian normatif yang tepat; dosen memberikan contoh penilaian argumentatif yang baik dan yang perlu diperbaiki sebagai model referensi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyampaikan umpan balik spesifik kepada rekan menggunakan lembar peer review berpanduan; mahasiswa menerima dan mendiskusikan umpan balik atas dokumennya sendiri; mahasiswa mulai merevisi dokumen analisis di akhir sesi berdasarkan catatan umpan balik yang diterima MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan variasi peer assessment: sesi peer review berpanduan rubrik	luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunggah draft lembar analisis kasus Minggu 9 ke LMS untuk diakses rekan; mahasiswa membaca panduan peer review dan rubrik penilaian yang diunggah dosen; mahasiswa menyiapkan catatan kritis terhadap dua dokumen rekan yang ditugaskan sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah dokumen analisis rekan secara kritis daring sebagai persiapan sesi peer review luring yang lebih mendalam	Badan Kepegawaian Negara (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Republik Indonesia (2014); Lembaga Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebagai wujud nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N; minimal memberikan satu umpan balik tertulis pada dokumen rekan Tugas: Dokumen analisis kasus revisi final: penyempurnaan lembar analisis dari Minggu 9 berdasarkan hasil peer review dan diskusi pleno, disertai catatan revisi singkat yang menjelaskan perubahan yang dilakukan; panjang 800-1000 kata, dikumpulkan via LMS akhir minggu	diikuti diskusi pleno untuk konsolidasi standar penilaian argumentatif kasus pelanggaran etika birokrasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa merevisi dan menyempurnakan lembar analisis kasus dari Minggu 9 berdasarkan umpan balik peer review dan diskusi pleno. Revisi wajib memperdalam analisis normatif dengan merujuk minimal dua pasal regulasi secara eksplisit, memperkuat koherensi alur argumentasi (fakta-norma-penilaian), dan menyertakan catatan revisi singkat (100-150 kata) yang menjelaskan bagian mana yang diubah dan mengapa. Nilai Integrity ICHSA-N diterapkan dengan tidak memanipulasi argumen hanya demi menghindari	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kritik, tetapi benar-benar mempertimbangkan umpan balik secara substansial. Deliverable: Dokumen analisis kasus revisi final (format Google Docs atau Word, 800-1000 kata) yang memuat: (1) versi revisi lengkap lembar analisis kasus dengan argumentasi yang disempurnakan, (2) catatan revisi singkat (100-150 kata) menjelaskan perubahan berdasarkan peer review, dan (3) pernyataan transparansi penggunaan AI bila digunakan; dikumpulkan via LMS paling lambat akhir minggu (H+3 setelah pertemuan luring)			
11,12	Sub-CPMK6: Merumuskan rekomendasi perbaikan etika birokrasi yang argumentatif dan bertanggung jawab atas kasus pelanggaran etika yang telah dievaluasi,	Mahasiswa mampu: Menjelaskan perbedaan antara evaluasi pelanggaran etika (diagnostik) dan perumusan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri; penilaian	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan secara singkat (15 menit) prinsip-prinsip rekomendasi perbaikan etika birokrasi yang baik: spesifik,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video penjelasan (20-25 menit) di LMS tentang perbedaan antara evaluasi dan	Bahan Kajian: Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan mempertimbangkan konteks regulasi dan nilai integritas aparatur.	rekomendasi perbaikan (preskriptif) sebagai dua tahap yang saling berkaitan dalam penanganan kasus birokrasi • Mengidentifikasi prinsip-prinsip perumusan rekomendasi perbaikan etika birokrasi yang argumentatif berdasarkan kerangka reformasi birokrasi dan nilai integritas aparatur • Merancang kerangka awal rekomendasi perbaikan etika atas kasus yang telah dievaluasi pada Minggu 9-10, dengan memetakan intervensi yang relevan pada level individu, prosedur, dan kelembagaan • Mengaitkan rekomendasi perbaikan yang dirancang dengan regulasi reformasi	dilakukan melalui kualitas kerangka awal rekomendasi yang disusun mahasiswa; rubrik menilai: kesesuaian rekomendasi dengan akar masalah yang teridentifikasi (35%), kejelasan pembedaan level intervensi individu-prosedur-kelembagaan (30%), keterkaitannya dengan regulasi reformasi birokrasi (25%), dan kelengkapan penyajian (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok dinilai berdasarkan	terukur, berbasis regulasi, dan kontekstual terhadap kondisi birokrasi daerah; dosen memfasilitasi kerja kelompok di mana mahasiswa secara kolaboratif merancang kerangka rekomendasi atas kasus yang sama yang telah dievaluasi, lalu mempresentasikan kerangka awal untuk mendapat umpan balik dosen (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berkolaborasi dalam kelompok untuk memetakan akar masalah kasus, mengklasifikasi jenis intervensi yang dibutuhkan, dan merumuskan butir-butir rekomendasi awal; tiap kelompok mempresentasikan kerangka rekomendasi (5-7 menit) dan menerima umpan balik dosen serta	rekomendasi dalam penanganan kasus pelanggaran etika birokrasi, serta kerangka tiga level intervensi perbaikan (individu, prosedur, kelembagaan); dosen mengunggah panduan penyusunan kerangka rekomendasi beserta contoh rekomendasi yang baik dan yang terlalu generik (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menonton video dosen, menelaah Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada bagian yang relevan dengan integritas ASN, lalu menyusun draft pemetaan akar masalah dari kasus yang telah mereka analisis pada Minggu 9-10 sebagai bahan masuk diskusi luring	• Hukum tata pemerintahan dan kelembagaan birokrasi; • Responsivitas dan prinsip antikorupsi birokrasi; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Badan Kepegawaian Negara (2021); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2021); Republik Indonesia (2014); Johnson (2018); Denhardt dan Denhardt (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		birokrasi yang berlaku, termasuk Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	kemampuan mengusulkan rekomendasi yang spesifik dan dapat dilaksanakan (bukan generik), serta kemampuan menjelaskan dasar regulasi tiap rekomendasi; nilai Nationalism ICHSA-N tercermin dalam kemampuan mengaitkan rekomendasi dengan semangat reformasi birokrasi nasional Tugas: Kerangka rekomendasi perbaikan etika (outline terstruktur): dokumen yang memuat pemetaan akar masalah dari kasus Minggu 9-10, tiga sampai	kelompok lain MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kerja kelompok terstruktur untuk merancang kerangka rekomendasi perbaikan etika birokrasi sebagai tahap awal proyek rekomendasi yang akan diselesaikan pada Minggu 12 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun kerangka rekomendasi perbaikan etika birokrasi atas kasus yang telah dievaluasi pada Minggu 9-10. Kerangka memuat: (1) ringkasan akar masalah yang teridentifikasi dari evaluasi sebelumnya, (2) tiga sampai lima butir rekomendasi yang diklasifikasikan per level	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mulai mengerjakan komponen pertama proyek rekomendasi (pemetaan masalah dan kerangka intervensi) secara mandiri daring sebelum disempurnakan bersama di pertemuan luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lima butir rekomendasi terklasifikasi per level intervensi, dan rujukan regulasi pendukung tiap rekomendasi; panjang 500-700 kata, dikumpulkan via LMS sebelum pertemuan Minggu 12	intervensi (level individu ASN, level prosedur kerja, dan level kelembagaan), serta (3) rujukan regulasi atau kebijakan yang mendukung tiap rekomendasi. Rekomendasi harus spesifik dan dapat dilaksanakan oleh instansi daerah, bukan rekomendasi generik. Nilai Adaptability ICHSA-N tercermin dalam kemampuan merancang rekomendasi yang responsif terhadap dinamika regulasi dan konteks birokrasi daerah Kawasan Timur Indonesia. Deliverable: Dokumen kerangka rekomendasi perbaikan etika (format Google Docs atau Word, 500-700 kata) yang memuat: (1) ringkasan akar masalah (100-150 kata), (2) tabel atau daftar berstruktur tiga sampai lima butir rekomendasi dengan kolom level			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				intervensi, uraian rekomendasi, dan rujukan regulasi, dan (3) catatan kontekstualisasi singkat terhadap kondisi birokrasi daerah; dikumpulkan via LMS sebelum pertemuan Minggu 12			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri; penilaian utama adalah kualitas dokumen rekomendasi tertulis final; rubrik penilaian mencakup: kedalaman argumentasi dan basis regulasi (35%), spesifisitas dan kelayakan rekomendasi per level intervensi (30%), koherensi antara evaluasi kasus (Minggu 9-	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi mini (5-7 menit per mahasiswa atau per kelompok bergantung jumlah kelas) di mana mahasiswa menyajikan rekomendasi perbaikan etika birokrasi dari kasus yang dianalisis; dosen dan mahasiswa lain memberikan tanggapan dan pertanyaan kritis; dosen menyimpulkan pola rekomendasi yang muncul lintas kasus dan mengaitkannya dengan agenda reformasi birokrasi nasional serta relevansinya bagi konteks Kawasan Timur Indonesia (10 menit penutup) (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan rekomendasi argumentatif di LMS yang memuat standar struktur dokumen (latar belakang kasus, analisis masalah, butir rekomendasi berlapis, justifikasi regulasi, implikasi implementasi); dosen membuka forum diskusi daring pra-presentasi di mana mahasiswa mengunggah slide ringkasan rekomendasi (3-5 slide) untuk mendapat tanggapan awal rekan sebelum sesi presentasi luring (via LMS;	Bahan Kajian: • Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; • Responsivitas dan prinsip antikorupsi birokrasi; • Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Badan Kepegawaian Negara (2021); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2021);	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10) dan rekomendasi yang diusulkan (25%), dan kejelasan sistematika penulisan (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam presentasi dan forum tanya-jawab kelas dinilai berdasarkan kemampuan mempertahankan argumen rekomendasi secara substansif, memberikan penilaian kritis yang konstruktif terhadap rekomendasi rekan, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pilihan rekomendasi yang diusulkan (nilai	kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan rekomendasi dan mempertahankan pilihan intervensi dengan argumentasi berbasis regulasi; mahasiswa mencatat umpan balik dari dosen dan rekan untuk penyempurnaan dokumen final; mahasiswa merevisi dokumen setelah sesi presentasi sebelum pengumpulan akhir MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi dan pertahanan proyek rekomendasi sebagai bentuk akuntabilitas akademik dan simulasi praktik perumusan kebijakan perbaikan etika birokrasi di lingkungan	sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyempurnakan kerangka rekomendasi Minggu 11 menjadi draft dokumen penuh; mahasiswa menyusun slide presentasi ringkasan (3-5 slide menggunakan Canva atau PowerPoint); mahasiswa menelaah slide rekan di LMS dan menyiapkan satu pertanyaan atau catatan kritis sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa menyelesaikan proyek rekomendasi secara mandiri daring dan mempersiapkan presentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban	Denhardt dan Denhardt (2015); Johnson (2018); Lembaga Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Integrity dan Service ICHSA-N) Tugas: Dokumen rekomendasi perbaikan etika birokrasi tertulis final: pengembangan penuh dari kerangka Minggu 11 menjadi dokumen argumentatif utuh dengan latar belakang kasus, analisis akar masalah, rekomendasi berlapis beserta justifikasi regulasi, dan implikasi implementasi; panjang 1000-1200 kata, dikumpulkan via LMS akhir minggu sebagai	pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun dokumen rekomendasi perbaikan etika birokrasi tertulis final sebagai pengembangan penuh dari kerangka Minggu 11. Dokumen harus memuat: latar belakang kasus yang dievaluasi (ringkas), analisis akar masalah yang teridentifikasi, tiga sampai lima butir rekomendasi berlapis per level intervensi (individu ASN, prosedur kerja, kelembagaan) masing-masing disertai justifikasi regulasi yang eksplisit, dan refleksi singkat tentang implikasi implementasi rekomendasi di konteks birokrasi daerah Kawasan Timur Indonesia. Dokumen ini merupakan produk akhir Sub-CPMK6 yang mencerminkan	publik atas hasil kerja proyek Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penutup Sub-CPMK6	kemampuan mahasiswa merumuskan rekomendasi yang argumentatif dan bertanggung jawab. Nilai Integrity dan Service ICHSA-N tercermin dalam rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak sekadar prosedural. Deliverable: Dokumen rekomendasi perbaikan etika birokrasi tertulis final (format Google Docs atau Word, 1000-1200 kata) yang memuat: (1) latar belakang dan ringkasan evaluasi kasus (150-200 kata), (2) analisis akar masalah berlapis (200-250 kata), (3) tiga sampai lima butir rekomendasi per level intervensi dengan justifikasi regulasi masing-masing (400-500 kata), (4) refleksi implikasi implementasi di konteks daerah (150-200 kata), dan (5) daftar rujukan regulasi dan pustaka yang			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				digunakan; dikumpulkan via LMS paling lambat akhir minggu (H+3 setelah pertemuan luring)			
13,14	Sub-CPMK7: Merancang konsep inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi (technopreneurship) yang merespons kebutuhan spesifik masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, disertai analisis kelayakan etis dan sosial awal.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi minimal dua kebutuhan spesifik masyarakat Kawasan Timur Indonesia yang dapat dijawab melalui inovasi layanan publik berbasis teknologi • Merancang konsep inovasi layanan publik beretika yang memuat nama layanan, deskripsi solusi teknologi, dan kelompok sasaran secara spesifik • Menghubungkan rancangan konsep inovasi dengan setidaknya dua prinsip etika pemerintahan (transparansi, akuntabilitas,	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian berbasis produk rancangan konsep inovasi yang memuat identifikasi masalah lokal, deskripsi solusi teknologi, dan pemetaan prinsip etika yang relevan; kriteria: ketajaman analisis kebutuhan lokal (C4), kesesuaian solusi dengan prinsip etika pemerintahan, dan kelengkapan elemen rancangan konsep	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu sesi workshop kelompok (4-5 mahasiswa) untuk menyempurnakan identifikasi masalah dan merancang konsep inovasi; dosen memberikan umpan balik langsung terhadap draf konsep kelompok menggunakan rubrik analisis kelayakan etis yang ditampilkan via LCD proyektor (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok mempresentasikan identifikasi masalah dan draf konsep inovasi awal (5 menit per kelompok) menggunakan slide Canva atau PowerPoint; kelompok lain	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pendek (10-15 menit) berisi studi kasus inovasi layanan publik berbasis teknologi di daerah tertinggal Indonesia beserta panduan penyusunan Konsep Inovasi Tahap 1 via Google Classroom atau Moodle; dosen membuka forum diskusi asinkron bertema tantangan layanan publik di Kawasan Timur Indonesia (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah video kasus, membaca panduan penyusunan konsep, menelusuri referensi regulasi relevan	Bahan Kajian: • Etika pelayanan publik berbasis teknologi; • Rancangan inovasi layanan publik beretika lokal; • Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; • Responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat lokal; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Osborne (2010); Kementerian PANRB (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020).	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		responsivitas, atau antikorupsi) - Menyusun analisis kelayakan etis awal dengan menilai potensi manfaat sosial dan risiko etis dari solusi teknologi yang diusulkan - Menunjukkan orientasi service dan kreativitas dalam rancangan konsep melalui argumentasi tertulis yang kontekstual terhadap tantangan lokal Kawasan Timur Indonesia	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi diskusi kelompok Project-Based Learning: mahasiswa mengemukakan argumen berbasis data atau regulasi, merespons masukan dengan sikap terbuka (nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N), dan menghormati perspektif konteks lokal anggota kelompok Tugas: Dokumen Konsep Inovasi Layanan Publik Tahap 1 (format Google Docs/Word, 600-900 kata) memuat: (a)	memberikan tanggapan terstruktur berdasarkan prinsip etika pemerintahan; dosen menutup dengan sintesis poin-poin kritis yang perlu disempurnakan sebelum Minggu 14 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: workshop kelompok perancangan konsep inovasi dengan umpan balik peer dan dosen; diskusi Case-Based Learning berbasis kasus nyata inovasi layanan publik di Kawasan Timur Indonesia (misalnya layanan kesehatan atau administrasi kependudukan berbasis digital) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (4-5 mahasiswa) menyusun	(UU ASN, Road Map Reformasi Birokrasi) secara mandiri, lalu mengisi lembar identifikasi masalah awal yang diunggah ke LMS sebelum pertemuan luring; mahasiswa yang menggunakan Generative AI wajib mencantumkan deklarasi penggunaan secara transparan sebagai wujud nilai Integrity ICHSA-N MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara mandiri daring menjajaki masalah layanan publik lokal sebagai langkah awal proyek inovasi berbasis teknologi yang akan dikembangkan hingga Minggu 15 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			identifikasi masalah layanan publik spesifik di Kawasan Timur Indonesia, (b) deskripsi solusi teknologi yang diusulkan, (c) kelompok sasaran, (d) pemetaan minimal dua prinsip etika pemerintahan, dan (e) analisis kelayakan etis awal (potensi manfaat dan risiko); dikumpulkan via LMS	Dokumen Konsep Inovasi Layanan Publik Tahap 1 yang mengidentifikasi satu masalah layanan publik nyata di Kawasan Timur Indonesia, merancang solusi berbasis teknologi, dan menyertakan analisis kelayakan etis awal. Konsep harus mengacu pada minimal dua prinsip etika pemerintahan dari teori-teori yang telah dipelajari dan relevan terhadap regulasi yang berlaku. Mahasiswa dianjurkan mengacu pada konteks lokal daerah asal atau daerah praktik pemerintahan yang dikenal. Deliverable: Dokumen Konsep Inovasi Layanan Publik Tahap 1 dalam format Google Docs atau Word (600-900 kata) yang memuat: identifikasi masalah layanan publik lokal Kawasan Timur Indonesia, deskripsi solusi teknologi, kelompok			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sasaran, pemetaan prinsip etika pemerintahan, dan analisis kelayakan etis awal (manfaat dan risiko); diunggah ke LMS paling lambat dua hari sebelum pertemuan Minggu 14			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian berbasis produk rancangan konsep inovasi Tahap 2 yang menunjukkan kedalaman analisis (C4-C5): ketajaman identifikasi risiko etis, kelengkapan desain alur layanan, kejelasan mekanisme pengawasan, dan kesesuaian dengan regulasi; rubrik penilaian mencakup	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi peer-review terstruktur: tiap kelompok mempresentasikan Konsep Inovasi Tahap 2 (7-10 menit), diikuti tanggapan dari kelompok reviewer yang telah ditunjuk berdasarkan rubrik analisis kelayakan etis dan sosial yang sama; dosen memberikan penilaian dan catatan penguatan untuk finalHari presentasi proposal Minggu 15 (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok menyajikan rancangan yang telah direvisi menggunakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi bacaan tambahan tentang desain layanan publik beretika dan panduan analisis risiko etis teknologi via LMS; dosen membuka sesi konsultasi kelompok asinkron melalui forum diskusi LMS untuk merespons pertanyaan revisi rancangan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara kelompok menelaah umpan balik dari Minggu 13, menelusuri regulasi relevan (UU Desa, UU ASN, Peraturan BKN)	Bahan Kajian: • Etika pelayanan publik berbasis teknologi; • Rancangan inovasi layanan publik beretika lokal; • Kode etik ASN dan pengelolaan konflik kepentingan; • Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; • Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dimensi orisinalitas solusi (nilai Creativity ICHSA-N) dan kontekstualisasi lokal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi peer-review kelompok: mahasiswa memberikan umpan balik konstruktif berbasis argumen etis yang terukur, bukan hanya opini; menunjukkan sikap integritas akademik dengan tidak menyalin rancangan kelompok lain; terlibat aktif dalam revisi kelompok sendiri	slide Canva atau PowerPoint; reviewer menggunakan lembar peer-review terstruktur (kriteria: kejelasan masalah, relevansi solusi teknologi, kedalaman analisis etis, dan aksesibilitas); dosen merangkum pola kelemahan umum dan memberikan panduan penyusunan proposal final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi peer-review terstruktur; Case-Based Learning: kelompok menilai rancangan sesama menggunakan kasus analogi pelanggaran etika teknologi di pemerintahan sebagai tolok ukur Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mengembangkan	sebagai basis validasi etis rancangan, dan merevisi draf Konsep Inovasi Tahap 1 menjadi Tahap 2 secara kolaboratif menggunakan Google Docs; tiap anggota wajib memberikan kontribusi terlacak (riwayat revisi Google Docs) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: pengembangan iteratif rancangan proyek berbasis umpan balik; mahasiswa menjalankan proses revisi mandiri-kolaboratif sebagai simulasi siklus perbaikan inovasi kebijakan publik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Denhardt & Denhardt (2015); Osborne (2010); Badan Kepegawaian Negara (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Kementerian PANRB (2021); Republik Indonesia (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Dokumen Konsep Inovasi Layanan Publik Tahap 2 (format Google Docs/Word, 900-1200 kata) yang merupakan pengembangan dari Tahap 1, memuat tambahan: (a) desain alur layanan berbasis teknologi, (b) analisis risiko etis dan sosial yang lebih rinci, (c) mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, (d) penilaian aksesibilitas bagi kelompok rentan, dan (e) penyesuaian berbasis umpan balik Minggu 13; dikumpulkan via LMS	Dokumen Konsep Inovasi Layanan Publik Tahap 1 menjadi Tahap 2 yang lebih rinci dan tervalidasi secara etis. Pengembangan mencakup desain alur layanan, analisis risiko etis (termasuk potensi konflik kepentingan dan risiko privasi data), mekanisme akuntabilitas, serta penilaian aksesibilitas bagi kelompok rentan di Kawasan Timur Indonesia. Kelompok juga wajib mencantumkan bagaimana rancangan mematuhi regulasi ASN dan antikorupsi yang berlaku. Dokumen Tahap 2 menjadi fondasi langsung bagi penyusunan Proposal Final yang akan dipresentasikan pada Minggu 15. Deliverable: Dokumen Konsep Inovasi Layanan Publik Tahap 2 dalam format Google Docs atau Word (900-1200 kata) beserta slide presentasi peer-review (Canva atau			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				PowerPoint, 8-12 slide); keduanya diunggah ke LMS paling lambat pada hari pertemuan Minggu 14 sebelum sesi dimulai			
15	Sub-CPMK8: Menyajikan proposal inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi secara lengkap—memuat latar belakang, desain solusi, analisis kelayakan etis-sosial, dan rencana implementasi—secara kolaboratif, kreatif, dan adaptif.	Mahasiswa mampu: - Menyajikan proposal inovasi layanan publik beretika berbasis teknologi secara lengkap dan sistematis mencakup latar belakang masalah, desain solusi, analisis kelayakan etis-sosial, dan rencana implementasi - Mengonstruksi argumentasi yang koheren antara masalah layanan publik lokal Kawasan Timur Indonesia, solusi teknologi yang diusulkan, dan prinsip etika pemerintahan yang mendasarinya	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian berbasis presentasi proposal (C6 dan A3): rubrik mencakup (1) kelengkapan komponen proposal, (2) kedalaman analisis kelayakan etis dan sosial, (3) orisinalitas dan kontekstualisasi lokal rancangan, (4) kualitas argumentasi dalam menjawab pertanyaan, (5) keterpaduan antara desain	BP — Mekanisme kuliah: Dosen bertindak sebagai moderator dan penilai sesi presentasi; tiap kelompok mendapat alokasi 15 menit (10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab dari dosen dan kelompok lain); dosen mencatat poin kritis dari setiap presentasi dan memberikan umpan balik holistik di akhir sesi terkait kualitas etis dan relevansi lokal keseluruhan proposal (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok menyajikan Proposal Final menggunakan slide Canva atau PowerPoint via LCD proyektor; kelompok penonton mengisi lembar evaluasi peer	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian presentasi final dan panduan teknis pengumpulan Proposal Final via LMS; dosen membuka sesi tanya-jawab singkat asinkron di forum LMS untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi kelompok sebelum pertemuan luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara kelompok menyelesaikan revisi akhir Proposal Final berdasarkan masukan Minggu 14, menyiapkan slide presentasi, dan berlatih	Bahan Kajian: - Rancangan inovasi layanan publik beretika lokal; - Etika pelayanan publik berbasis teknologi; - Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; - Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; - Pemerintahan desa dan etika lokal Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Osborne (2010); Johnson (2018);	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Mengevaluasi proposal kelompok lain menggunakan rubrik kelayakan etis dan sosial secara kritis dan objektif • Menampilkan kolaborasi kelompok yang efektif dalam penyajian, pembagian peran presentasi, dan respons terhadap pertanyaan penguji (nilai Harmony dan Service ICHSA-N) • Menyesuaikan argumen dan komponen proposal berdasarkan pertanyaan dan masukan dari dosen serta kelompok lain selama sesi presentasi (nilai Adaptability ICHSA-N) • Menunjukkan integritas akademik dalam penyajian dengan mencantumkan	solusi dan prinsip etika pemerintahan; bobot penilaian tiap dimensi ditetapkan dalam rubrik yang telah dibagikan via LMS pada Minggu 14 Partisipasi kelas & laboratorium: Seluruh anggota kelompok wajib berperan aktif dalam presentasi (tidak ada anggota pasif); kualitas partisipasi dinilai dari kemampuan merespons pertanyaan berbasis argumen etis, menghargai masukan kelompok lain, dan menjaga etika komunikasi akademik selama	menggunakan rubrik yang sama; di penghujung sesi, dosen merangkum pola kekuatan dan kelemahan lintas kelompok serta memetakan relevansi seluruh proposal terhadap isu nyata pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi dan evaluasi produk akhir proyek inovasi; simulasi forum inovasi kebijakan publik yang mendorong mahasiswa menyampaikan gagasan secara profesional, kritis, dan beretika Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok menyusun dan mempresentasikan Proposal Inovasi Layanan	pembagian peran penyajian; kelompok mengunggah versi final dokumen proposal dan slide ke LMS sebelum batas waktu yang ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: finalisasi produk proyek inovasi layanan publik beretika sebagai puncak siklus perancangan yang dimulai dari Minggu 13 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Kooiman (2003); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Kementerian PANRB (2021); Lembaga Administrasi Negara (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		seluruh sumber, menyatakan kontribusi anggota, dan mengakui penggunaan Generative AI bila ada (nilai Integrity ICHSA-N)	sesi berlangsung Tugas: Proposal Inovasi Layanan Publik Beretika Final (format Google Docs atau Word, 1500-2000 kata) memuat: latar belakang dan identifikasi masalah, desain solusi teknologi, analisis kelayakan etis-sosial, rencana implementasi singkat (target penerima manfaat, mitra potensial, tahapan), daftar pustaka; disertai slide presentasi (Canva atau PowerPoint, 12-16 slide); keduanya diunggah ke LMS paling lambat H-1	Publik Beretika Final yang merupakan integrasi menyeluruh dari proses perancangan Minggu 13-14. Proposal memuat latar belakang masalah layanan publik di Kawasan Timur Indonesia, desain solusi berbasis teknologi yang orisinal, analisis kelayakan etis dan sosial yang komprehensif, serta rencana implementasi singkat. Seluruh komponen harus menunjukkan keterpaduan dengan prinsip etika pemerintahan, regulasi ASN yang berlaku, dan semangat pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Presentasi dilakukan secara kolaboratif dengan pembagian peran yang merata antar anggota kelompok. Deliverable: Proposal Inovasi Layanan Publik Beretika Final dalam format Google Docs atau			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebelum pertemuan Minggu 15	Word (1500-2000 kata) beserta slide presentasi (Canva atau PowerPoint, 12-16 slide); keduanya diunggah ke LMS paling lambat H-1 pertemuan Minggu 15; presentasi langsung di kelas pada pertemuan Minggu 15 dengan seluruh anggota kelompok hadir dan berperan aktif			
16		Mahasiswa mampu: • Mengintegrasikan seluruh konsep etika pemerintahan yang dipelajari sepanjang semester dalam menjawab soal ujian secara mandiri dan jujur • Menganalisis kasus pelanggaran etika birokrasi atau inovasi layanan publik berdasarkan teori etika (utilitarisme, deontologi, keutamaan) dan prinsip tata	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester (UAS) dalam bentuk esai analitis (open-case) berbasis skenario kasus pemerintahan; mahasiswa menganalisis dan mengevaluasi kasus menggunakan kerangka teori etika dan prinsip tata pemerintahan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membagikan soal UAS (skenario kasus pelanggaran etika birokrasi atau inovasi layanan publik) dan memandu mahasiswa memahami instruksi soal sebelum ujian dimulai; dosen mengawasi pelaksanaan ujian dan memastikan kondisi yang mendukung integritas akademik (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah informasi teknis pelaksanaan UAS (cakupan materi, format soal, tata tertib) via LMS minimal tiga hari sebelum ujian; dosen membuka sesi tanya-jawab singkat asinkron di forum LMS untuk klarifikasi teknis (bukan substansi soal) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Konsep dasar etika dan filsafat moral; • Teori etika: utilitarisme, deontologi, keutamaan; • Etika pemerintahan sebagai norma penyelenggaraan negara; • Prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; • Responsivitas dan prinsip antikorupsi	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan yang baik • Mengevaluasi kebijakan atau praktik pemerintahan nyata dengan menggunakan kerangka etika pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan antikorupsi • Menunjukkan integritas akademik selama pelaksanaan ujian sebagai wujud nilai Integrity ICHSA-N dan komitmen terhadap etika pemerintahan yang dipelajari	yang dipelajari; kriteria penilaian: kedalaman analisis (C4-C5), ketepatan penggunaan konsep teoritis, kualitas argumentasi etis, dan koherensi kesimpulan; tidak ada kunci jawaban tunggal, penilaian berbasis rubrik analitik Partisipasi kelas & laboratorium: Kepatuhan terhadap tata tertib ujian sebagai cerminan etika akademik; mahasiswa dilarang menggunakan sumber tidak sah atau Generative AI selama ujian tanpa izin dosen; kehadiran tepat	Mahasiswa mengerjakan soal UAS esai analitis secara mandiri dan tertulis di ruang ujian dalam batas waktu yang ditetapkan; jawaban harus menunjukkan kemampuan mengintegrasikan teori etika, prinsip tata pemerintahan, dan konteks pemerintahan Indonesia yang relevan MP — Metode Pembelajaran: Asesmen sumatif individual berbasis analisis kasus: mahasiswa mendemonstrasikan capaian pembelajaran akhir secara mandiri sebagai pertanggungjawaban atas seluruh proses pembelajaran semester Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	Mahasiswa melakukan revidi mandiri atas seluruh materi semester (Minggu 1-15) menggunakan catatan kuliah, dokumen tugas, dan referensi pustaka yang telah dipelajari; mahasiswa dapat menggunakan LMS untuk mengakses kembali materi yang diunggah dosen sepanjang semester MP — Metode Pembelajaran: Pembelajaran mandiri berbasis review integratif: mahasiswa mengonsolidasikan pemahaman lintas topik sebagai persiapan ujian komprehensif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	birokrasi; • Kode etik ASN dan pengelolaan konflik kepentingan; • Evaluasi pelanggaran etika dan rekomendasi perbaikan; • Etika pelayanan publik berbasis teknologi; Pustaka: Denhardt & Denhardt (2015); Johnson (2018); Kooiman (2003); Osborne (2010); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Badan Kepegawaian Negara (2021); Lembaga Administrasi Negara (2021); Republik Indonesia (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			waktu dan penyelesaian ujian secara mandiri dinilai sebagai indikator internalisasi nilai Integrity ICHSA-N Tugas: Lembar jawaban UAS esai analitis (format tertulis, 3-5 halaman atau setara waktu ujian yang ditetapkan) yang memuat analisis kasus pemerintahan menggunakan minimal dua teori etika dan dua prinsip tata pemerintahan yang baik; dikumpulkan langsung di akhir sesi ujian	Ujian Akhir Semester berupa esai analitis berbasis skenario kasus pemerintahan nyata atau hipotetis yang relevan dengan isu etika birokrasi, antikorupsi, atau inovasi layanan publik di Indonesia. Mahasiswa diminta menganalisis kasus menggunakan kerangka teori etika yang telah dipelajari dan memberikan rekomendasi perbaikan yang beretika, kontekstual, dan dapat diimplementasikan. Ujian bersifat individual, mandiri, dan mencerminkan internalisasi nilai etika pemerintahan sebagai pencapaian akhir semester. Deliverable: Lembar jawaban UAS esai analitis tertulis (3-5 halaman atau sesuai durasi ujian yang ditetapkan) memuat: identifikasi masalah etis dalam skenario kasus, analisis menggunakan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				minimal dua teori etika dan dua prinsip tata pemerintahan, evaluasi dampak pelanggaran atau potensi inovasi, dan rekomendasi perbaikan yang etis dan kontekstual; dikumpulkan langsung kepada dosen di akhir sesi UAS			

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri, **P**=Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Kuis Teori Etika	10	
2	Tugas Analisis Kasus	10	
3	UTS	20	
4	UAS	20	
5	Proyek Inovasi Pelayanan	40	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Kuis Teori Etika	Tugas Analisis Kasus	UTS	UAS	Proyek Inovasi Pelayanan	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	5	—	5	—	—	10
Sub-CPMK2	5	—	5	—	—	10
Sub-CPMK3	—	5	5	—	—	10
Sub-CPMK4	—	5	5	—	—	10
Sub-CPMK5	—	—	—	5	10	15
Sub-CPMK6	—	—	—	5	10	15
Sub-CPMK7	—	—	—	5	10	15
Sub-CPMK8	—	—	—	5	10	15
Bobot Komponen (%)	10	10	20	20	40	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Merancang Proposal Inovasi Pelayanan Publik Beretika Berbasis Teknologi sebagai Respons atas Pelanggaran Etika Birokrasi di Kawasan Timur Indonesia

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Etika Pemerintahan				
KODE	3PBIP300	sks	3	SEMESTER	3
DOSEN PENGAMPU	Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) berbasis studi kasus kontekstual Kawasan Timur Indonesia					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Merancang Proposal Inovasi Pelayanan Publik Beretika Berbasis Teknologi sebagai Respons atas Pelanggaran Etika Birokrasi di Kawasan Timur Indonesia					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK3: Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui studi kasus nyata di Kawasan Timur Indonesia (pemerintah provinsi/kabupaten/kota).					
Sub-CPMK4: Menganalisis penerapan prinsip responsivitas dan etika pemerintahan desa dalam kerangka hubungan pusat-daerah melalui studi kasus penyelenggaraan pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia.					

Sub-CPMK5: Mengevaluasi kasus pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah berdasarkan regulasi hukum tata pemerintahan dan Kode Etik ASN, menghasilkan penilaian tertulis yang argumentatif. Sub-CPMK6: Merumuskan rekomendasi perbaikan etika birokrasi yang argumentatif dan bertanggung jawab atas kasus pelanggaran etika yang telah dievaluasi, dengan mempertimbangkan konteks regulasi dan nilai integritas aparatur. Sub-CPMK7: Merancang konsep inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi (technopreneurship) yang merespons kebutuhan spesifik masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, disertai analisis kelayakan etis dan sosial awal. Sub-CPMK8: Menyajikan proposal inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi secara lengkap—memuat latar belakang, desain solusi, analisis kelayakan etis-sosial, dan rencana implementasi—secara kolaboratif, kreatif, dan adaptif.
DISKRIPSI TUGAS Mahasiswa secara berkelompok (3–4 orang) mengidentifikasi kasus nyata pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintahan daerah atau desa di Kawasan Timur Indonesia, mengevaluasinya berdasarkan regulasi antikorupsi dan Kode Etik ASN, lalu merumuskan rekomendasi perbaikan etika birokrasi sekaligus merancang proposal inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi (technopreneurship) yang merespons akar permasalahan tersebut. Seluruh tahapan dijalankan secara progresif dari minggu ke minggu, mencerminkan integrasi Sub-CPMK 3–8, dan dipresentasikan di hadapan dosen serta pembahas tamu dari unsur pemerintahan atau lembaga pengawas daerah.
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus) Identifikasi & dokumentasi kasus pelanggaran etika/konflik kepentingan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa di Kawasan Timur Indonesia (minimal 1 kasus terverifikasi dari sumber resmi: putusan KPK, OMBUDSMAN, BPK, atau pemberitaan media terverifikasi). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas: menelaah apakah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dilanggar dalam kasus yang dipilih, didukung data/dokumen primer. Evaluasi normatif berbasis regulasi: penilaian argumentatif terhadap kasus menggunakan UU No. 28/1999, UU No. 20/2001, PP No. 53/2010, dan Kode Etik ASN serta tiga teori etika (utilitarisme, deontologi, keutamaan). Rumusan rekomendasi perbaikan etika birokrasi: minimal 3 rekomendasi terstruktur (jangka pendek, menengah, panjang) yang kontekstual terhadap kapasitas regulatif dan kelembagaan daerah bersangkutan. Desain konsep inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi (technopreneurship): solusi digital/teknologi tepat guna yang secara langsung merespons celah etika yang teridentifikasi, disertai analisis kelayakan etis-sosial (ethical feasibility canvas) dan pemetaan pemangku kepentingan. Rencana implementasi awal: tahapan adopsi, mitra potensial, indikator keberhasilan etis, dan mitigasi risiko etis-sosial. Presentasi kolaboratif & responsif: pitching proposal di hadapan dosen dan pembahas tamu, dengan sesi tanya-jawab kritis selama 15 menit per kelompok.
LANGKAH Pengerjaan Tugas Tahap 1 – Orientasi & Pembentukan Kelompok (Mg 9): Dosen memaparkan kerangka final project; mahasiswa membentuk kelompok (3–4 orang), memilih wilayah kajian di Kawasan Timur Indonesia, dan mengajukan usulan kasus (1 halaman) untuk disetujui dosen. Nilai ICHSA-N: Integrity — komitmen memilih kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap 2 – Pengumpulan Data & Identifikasi Kasus (Mg 10): Kelompok mengumpulkan dokumen resmi (putusan/laporan lembaga pengawas, peraturan daerah, berita terverifikasi) terkait kasus yang disetujui; menyusun ringkasan kasus tertulis (2–3 halaman) memuat fakta kronologis, aktor, dan dampak. Nilai ICHSA-N: Nationalism — kepekaan terhadap persoalan tata pemerintahan di daerah terdepan/tertinggal. Tahap 3 – Analisis Etis & Normatif (Mg 11): Kelompok menganalisis kasus menggunakan tiga teori etika pemerintahan dan mengevaluasi pelanggaran berdasarkan UU No. 28/1999, UU No. 20/2001, dan Kode Etik ASN; menghasilkan matriks evaluasi normatif yang memuat dimensi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Tahap 4 – Perumusan Rekomendasi Perbaikan Etika (Mg 12): Berdasarkan matriks evaluasi, kelompok merumuskan minimal 3 rekomendasi perbaikan etika birokrasi yang argumentatif, terstruktur (jangka pendek/tenengah/panjang), dan kontekstual terhadap kapasitas kelembagaan daerah. Nilai ICHSA-N: Service — orientasi rekomendasi pada kepentingan masyarakat yang terdampak. Tahap 5 – Perancangan Konsep Inovasi Teknologi (Mg 13): Kelompok merancang konsep inovasi pelayanan publik beretika berbasis teknologi yang secara langsung merespons celah etika yang teridentifikasi; menyusun Ethical Feasibility Canvas (9 elemen: masalah etis, solusi teknologi, nilai etis utama, segmen penerima manfaat, kanal, mitra, sumber daya, risiko etis, indikator dampak sosial) dan pemetaan pemangku kepentingan. Nilai ICHSA-N: Creativity & Adaptability — inovasi teknologi tepat guna yang realistis untuk konteks infrastruktur KTI.

Tahap 6 – Penyusunan Rencana Implementasi & Integrasi Dokumen (Mg 14): Kelompok menyusun rencana implementasi awal (timeline, mitra potensial, indikator keberhasilan etis, mitigasi risiko) dan mengintegrasikan seluruh komponen menjadi dokumen proposal final; mengunggah draf ke platform LMS untuk umpan balik dosen paling lambat H-3 sebelum presentasi. Nilai ICHSA-N: Harmony — mempertimbangkan keselarasan inovasi dengan nilai sosial-budaya lokal.

Tahap 7 – Presentasi & Pitching Final (Mg 15–16): Setiap kelompok mempresentasikan proposal (20 menit presentasi + 15 menit tanya-jawab) di hadapan dosen dan pembahas tamu; setiap anggota kelompok wajib menjelaskan bagian yang menjadi tanggung jawab individualnya. Nilai ICHSA-N: Integrity & Service — menyajikan argumen secara jujur, terbuka terhadap kritik, dan berorientasi pada solusi nyata.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Dokumen Proposal Final (15–20 halaman, format A4, Times New Roman 12, spasi 1,5) memuat: (a) ringkasan kasus dan fakta kronologis, (b) matriks evaluasi normatif dan analisis tiga teori etika, (c) rekomendasi perbaikan etika birokrasi minimal 3 butir terstruktur, (d) Ethical Feasibility Canvas inovasi teknologi, (e) pemetaan pemangku kepentingan, (f) rencana implementasi awal; 2) Slide presentasi (maks. 20 slide, format PPT/PDF, diunggah ke LMS); 3) Rekaman video pitching (minimal 30 menit, diunggah ke platform yang ditentukan dosen); 4) Lembar kontribusi individu (ditandatangani seluruh anggota kelompok, dilampirkan dalam dokumen proposal).

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. Kualitas Identifikasi & Dokumentasi Kasus (bobot 15%). Kasus bersumber dari dokumen resmi yang terverifikasi, fakta kronologis disajikan akurat dan lengkap, relevansi kasus terhadap etika pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia dinyatakan secara eksplisit.

b. Kedalaman Analisis Etis & Evaluasi Normatif (bobot 25%). Matriks evaluasi normatif memuat ketiga teori etika (utilitarisme, deontologi, keutamaan) dan mengaitkan pelanggaran secara spesifik dengan pasal-pasal UU No. 28/1999, UU No. 20/2001, dan Kode Etik ASN; dimensi akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas dianalisis secara terpisah dan berargumen logis.

c. Kualitas Rekomendasi Perbaikan Etika Birokrasi (bobot 20%). Rekomendasi minimal 3 butir, berjenjang (jangka pendek/menengah/panjang), argumentatif dengan dasar regulasi, kontekstual terhadap kapasitas kelembagaan daerah yang dikaji, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak.

d. Rancangan Inovasi Pelayanan Publik Beretika Berbasis Teknologi (bobot 25%). Ethical Feasibility Canvas memuat 9 elemen secara lengkap dan koheren; solusi teknologi yang dirancang secara langsung merespons celah etika yang teridentifikasi, realistis untuk konteks infrastruktur Kawasan Timur Indonesia, dan disertai analisis risiko etis-sosial serta indikator dampak yang terukur.

e. Kualitas Presentasi & Kemampuan Argumentasi (bobot 15%). Penyajian sistematis, seluruh anggota kelompok berkontribusi aktif menjelaskan bagian masing-masing, mampu mempertahankan argumen secara kritis dan adaptif dalam sesi tanya-jawab dengan dosen dan pembahas tamu.

JADWAL PELAKSANAAN

Mg 9 — Orientasi final project, pembentukan kelompok, pengajuan usulan kasus (deliverable: form usulan kasus 1 hal., disetujui dosen).

Mg 10 — Pengumpulan data & penyusunan ringkasan kasus (deliverable: ringkasan kasus tertulis 2–3 hal., dikumpulkan via LMS).

Mg 11 — Analisis etis & evaluasi normatif (deliverable: draf matriks evaluasi normatif, dikonsultasikan kepada dosen).

Mg 12 — Perumusan rekomendasi perbaikan etika birokrasi (deliverable: draf rekomendasi min. 3 butir terstruktur, dikonsultasikan kepada dosen).

Mg 13 — Perancangan Ethical Feasibility Canvas & pemetaan pemangku kepentingan (deliverable: draf canvas dan peta pemangku kepentingan, dikonsultasikan kepada dosen).

Mg 14 — Penyusunan rencana implementasi & integrasi dokumen proposal final (deliverable: draf proposal final)

diunggah ke LMS maks. H-3 sebelum presentasi untuk umpan balik dosen). Mg 15–16 — Presentasi & pitching final di hadapan dosen dan pembahas tamu (deliverable: slide PPT/PDF + rekaman video pitching + lembar kontribusi individu, diunggah ke LMS maks. H-1 sebelum sesi presentasi).	
LAIN-LAIN	
Final project dikerjakan secara kelompok (3–4 mahasiswa per kelompok) dengan komposisi anggota lintas minat yang ditetapkan pada Mg 9 dan tidak dapat diubah setelah disetujui dosen; kontribusi individu dibuktikan melalui Lembar Kontribusi Individu yang ditandatangani seluruh anggota dan dilampirkan dalam dokumen proposal, serta dinilai secara terpisah oleh dosen melalui observasi keaktifan pada sesi konsultasi dan presentasi — mahasiswa yang tidak hadir dalam sesi presentasi tanpa izin tertulis yang disetujui dosen memperoleh nilai komponen presentasi = 0; pengumpulan draf dan dokumen final melalui LMS dengan batas waktu yang tercantum dalam jadwal, keterlambatan pengumpulan dikenai pengurangan nilai 5 poin per hari keterlambatan (maks. 3 hari kalender), lewat dari 3 hari dinyatakan tidak mengumpulkan; seluruh sumber data dan dokumen yang digunakan wajib dicantumkan dalam daftar referensi menggunakan format APA 7th edition, dan plagiasi terdeteksi di atas 25% (Turnitin/tools sejenis) akan mengakibatkan kelompok wajib merevisi dan mempresentasikan ulang; nilai integritas (Integrity) ICHSA-N ditekankan dalam seluruh tahapan, terutama dalam pemilihan sumber data kasus yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan etis.	
DAFTAR RUJUKAN	
Bertens, K. (2013). Etika. Gramedia Pustaka Utama. Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia Pustaka Utama. Kumorotomo, W. (2008). Etika Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada. Santosa, P. (2008). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Aditama. Sinambela, L. P. (2012). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	

5.1 Kuis Teori Etika (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis Teori Etika			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.2 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Penguasaan materi	Menguasai penuh, menjelaskan lugas & benar	Menguasai, sedikit ragu	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
2	Organisasi & sistematika	Runtut, logis, mudah diikuti	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
3	Media & visual	Menarik, jelas, mendukung isi	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu
4	Komunikasi & bahasa tubuh	Percaya diri, kontak mata, intonasi tepat	Cukup baik	Datar/bergantung catatan	Cemas, membaca terus
5	Tanggapan pertanyaan	Menjawab tepat & meyakinkan	Menjawab memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)

1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.5 Proyek Inovasi Pelayanan

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Proyek Inovasi Pelayanan			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi
3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.